

# **BAB I**

## **PENDAHULUANI**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, menyatakan bahwa Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk- bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang- undangan dan hukum internasional. Secara keseluruhan bumi, wilayah lautan lebih luas dibandingkan dengan luas daratan dengan perbandingan kurang lebih 70:30, sehingga hal ini menjadikan negara- negara yang memiliki kepentingan dengan laut berupaya untuk mengedepankan maritimnya. Oleh karena itu laut menjadi signifikan dan mendominasi dalam mengantarkan kemajuan negara.

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia (Pushidrosal, 2019), Indonesia memiliki potensi maritim luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya. Pada tahun 2004 Presiden George Bush (Marsetio, 2014) menyatakan bahwa betapa pentingnya mengamankan segala domain maritim di negaranya. Domain maritim/ Maritim Domain Awareness (MDA) ini didefinisikan sebagai semua area dan segala sesuatu di bawah, di atas dan di dalam yang berkaitan, berbatasan atau berhubungan dengan samudera, laut atau jalur navigasi lainnya, termasuk pula segala aktivitas terkait kemaritiman, muatan dan kapal, infrastruktur, orang atau pelaku, serta kendaraan pengangkut lainnya. MDA dapat diartikan pula sebagai pemahaman secara efektif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan domain maritim, yang dapat memberikan dampak terhadap keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan serta mampu mengidentifikasi ancaman secara dini dan pada jarak sejauh mungkin dari pantai.

Secara Geografis posisi Negara Indonesia sangat strategis, yaitu terletak diantara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga secara umum wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mana memiliki arti penting terkait dengan iklim dan perekonomian. Sesuai data terakhir yang didapat dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal, 2019) menyebutkan bahwa Negara Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia memiliki 17.504 pulau, panjang garis pantai mencapai 81.290 km, serta luas keseluruhan wilayah kurang lebih 8,4 juta km<sup>2</sup> dengan luas perairan kurang lebih 6,5 juta km<sup>2</sup>. Luas perairan tersebut terdiri dari laut teritorial seluas 0,29 juta km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3,1 juta km<sup>2</sup>.

Negara Indonesia berbatasan darat dengan tiga negara yang terdiri dari Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste. Selain itu juga Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan sepuluh negara yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, India, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia (Pushidrosal, 2019). Dihadapkan pada posisi strategis tersebut, dimana dua per tiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, sehingga kita perlu memahami dan mengelola segala potensi sumber daya nasional yang terkandung di dalamnya, sehingga akan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakatnya serta akan mendukung suatu sistem pertahanan negara.

Potensi kekayaan alam yang beraneka ragam dan melimpah ruah hampir diseluruh wilayah nusantara menjadikan Indonesia memiliki daya tarik, perhatian dan kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan yang kurang memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Melihat kondisi demikian dihadapkan dengan lingkungan strategis yang berkembang, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap ancaman baik tradisional maupun non tradisional yang akan mengancam

kedaulatan NKRI dengan memperhatikan perkembangan global, regional dan nasional. Pertahanan negara yang kuat dan tangguh melalui konsep Strategi Pertahanan Negara merupakan jawaban untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, oleh sebab itu perlu dirumuskan suatu strategi pertahanan negara yang dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan dalam penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Setneg RI, 2004).

Sebagai bangsa yang secara historis pernah mengalami kejayaan maritim, patut harus kita sadari bahwa potensi kemaritiman dan kelautan yang dimiliki Indonesia sangatlah luar biasa, hal ini merupakan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas kondisi geografis Indonesia. Akan tetapi apabila kita tidak mampu mengelola dan memanfaatkan secara optimal maka akan menimbulkan konflik di masa datang. Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini yaitu tentang konsep menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan langkah yang tepat dalam melakukan gerakan perubahan guna membangun masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Presiden berupaya untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Kebijakan PMD ini dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI), Nomor 16 Tahun 2017 yang berisi tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Setneg RI, 2017), yang mana pada pasal 1 menyebutkan bahwa : *Pertama*, Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/ lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.

*Kedua*, Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat serta

mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

*Ketiga*, Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia adalah dokumen yang memuat uraian pedoman umum kebijakan kelautan.

*Keempat*, Rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sektor kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional.

Sebagai turunan dari Perpres tersebut, Kemhan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 9 Tahun 2018 yang berisi tentang Kebijakan Maritim Indonesia dalam mendukung Poros Maritim Dunia (PMD) yang dijadikan sebagai pedoman seluruh Kementrian/ Lembaga (Kemhan RI, 2018). Dalam pendahuluan Permenhan tersebut menyatakan bahwa Poros Maritim Dunia akan terwujud apabila pertahanan kekuatan maritim Indonesia memadai. Sehingga akan menimbulkan efek daya tangkal (*Deterrence*) terhadap ancaman pada kedaulatan dan keamanan Nasional.

Dalam mewujudkan Negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Presiden RI menetapkan lima pilar utama potensi kemaritiman yang dapat dimanfaatkan, diolah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat beragam, hal ini bisa dilihat dari berbagai sektor antara lain pertahanan, pelayaran, perairan dalam, wisata bahari, industri maritim, energi kelautan, mineral laut, industri bioteknologi kelautan dan lain- lain. Hal ini pada dasarnya jika dikelola dan diberdayakan dengan baik dan benar akan memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran negara serta rakyat Indonesia.



**Grafik 1.1 Perkembangan Angka Kemiskinan di Kalimantan Barat  
September 2019 – Maret 2021**

Sumber : BPS Provinsi Kalbar tanggal 15 Juli 2021

Masyarakat pesisir Indonesia sebagai bagian dari kekuatan potensi maritim, masih diidentikan dengan kelompok orang tertinggal di daerah pesisir. Pada grafik 1.1 menunjukkan perkembangan kemiskinan selama tiga tahun terakhir di provinsi Kalbar. Sumber mata pencaharian masyarakat pesisir Kalbar pada umumnya masih bergantung dari sumber daya kelautan dan pesisir pantai. Hal ini menjadi sangat ironis, sebab pada saat bersamaan pemerintah mengkampanyekan potensi maritim yang melimpah, akan tetapi di sisi lain masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Fakta yang terjadi saat ini masih sangat banyak terlihat pemukiman kumuh di banyak wilayah perairan, dan tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah. Kondisi ini sangat mudah terpengaruh oleh perubahan politik, ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya mereka tidak kuasa membendung terhadap para investor maupun penguasa yang datang untuk mengambil alih pengelolaan SDA tersebut, khususnya terkait potensi maritimnya.

Sebagai Upaya dalam mengembangkan potensi maritim yang ada di Indonesia saat ini, guna memberdayakan masyarakat pesisir menjadi memiliki kehidupan perekonomian yang lebih baik (Itsaini, 2021) adalah dengan mengembangkan : *Pertama*, Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi Daya. Potensi sumber daya kelautan yang paling besar

dihasilkan dari sumber daya perikanan; *Kedua*, Bidang Hutan Mangrove atau hutan bakau; *Ketiga*, Bidang Terumbu Karang; *Keempat*, Bidang Pertambangan dan energi; *Kelima*, Bidang Padang Lamun; dan *Keenam*, Bidang Pariwisata Bahari. Akan tetapi hal tersebut dirasakan masih belum optimal, sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya seperti : *Pertama*, Melakukan perubahan paradigma pembangunan nasional, dari pembangunan berlandaskan daratan menjadi pembangunan berlandaskan kelautan; *Kedua*, Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim; *Ketiga*, Menyiapkan regulasi atau aturan yang disesuaikan dengan semua pihak, baik dalam maupun luar negeri.

Bagi Negara dan Bangsa Indonesia, pengakuan dunia Internasional sebagai negara kepulauan pertama kalinya, memiliki arti yang sangat penting. Penetapan tersebut dilaksanakan pada saat diselenggarakannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) ke III pada tahun 1982 yang bertempat di Montego Bay Jamaika melalui *United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982*. Konvensi ini berisikan tentang bagaimana mengatur secara menyeluruh yang meliputi hampir semua kegiatan di laut. Selanjutnya deklarasi ini diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Dilihat dari isinya, konvensi hukum laut baru ini memuat rejim-rejim hukum laut baru tentang kelautan yang sebelumnya diatur dalam Konvensi hukum laut Jenewa 1958. Rejim-rejim hukum laut yang baru itu antara lain berisikan tentang kepulauan, batas lebar laut wilayah sepanjang 12 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari pantai, atau penambangan di dasar samudera paling dalam dan sebagainya (Diskum TNI-AL, 1995). Hal ini berarti UNCLOS 1982 secara hukum melindungi segenap sumber daya nasional untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Permenhan No. 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Maritim dalam Mendukung Poros Maritim Dunia, Maritim merupakan kawasan yang meliputi kolom air dan permukaan laut, baik yang merupakan laut wilayah kedaulatan (laut teritorial dan laut pedalaman), laut bukan wilayah kedaulatan namun negara memiliki hak- hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu (Zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen), maupun laut lepas/ laut bebas (*high seas*); dasar laut dan tanah di bawahnya; wilayah pesisir dan pulau kecil; serta, wilayah udara di atasnya. Kemudian pada UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara Kepulauan. Pada Undang-undang tersebut disebutkan pula tentang sistem pertahanan Indonesia yang penyelenggaraan pertahanannya dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata), dengan melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan, yang dalam pengorganisasiannya dikelompokkan menjadi komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung (Setneg RI, 2002).

Pada Undang- Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa TNI mengemban tugas pokok menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI melaksanakan gelar kekuatan yang terdiri dari kekuatan terpusat dan gelar kekuatan kewilayahan TNI yang tersebar di seluruh wilayah nasional. Salah satu kekuatan kewilayahan yang sudah tergelar adalah Pangkalan Utama TNI AL yang merupakan Satuan Komando Kewilayahan aspek laut. Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal XII, 2016) ini

mempunyai tugas melaksanakan dukungan operasi, dukungan logistik dan administrasi serta dukungan khusus kepada satuan-satuan operasional TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Lantamal XII.

Selanjutnya Undang- Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9 tentang TNI Angkatan Laut menjelaskan pula tugas yang diemban TNI AL yaitu melaksanakan Pengendalian Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla). Berdasarkan tugas tersebut maka konsep Sistem Pertahanan Negara yang pada awalnya menitikberatkan pada upaya mempertahankan stabilitas teritorial, bergeser menjadi upaya pemberdayaan wilayah. Konsep tersebut selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan wilayah pertahanan. Hal- hal terkait dengan kkebutuhan akan tujuan penyelenggaraan kegiatan pertahanan dan keamanan dalam perspektif tersebut seperti sudah diketahui yaitu dengan adanya konsep pertahanan berupa Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.

Menurut Perkasal Tahun 2018 tentang Doktrin Pengendalian Wilayah Pertahanan Laut (Mabes TNI AL, 2018), menyatakan bahwa Laut sebagai media yang strategis bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan keberadaannya sebagai bangsa bahari sekaligus sebagai wahana masa depan dan identitas bangsa Indonesia yang mengandung makna sangat luas, diantaranya laut berfungsi sebagai:

- a. Media Pemersatu Bangsa. Sehubungan dengan Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*), maka laut harus dipandang sebagai media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau yang ada.
- b. Media Pertahanan. Laut bagi bangsa Indonesia digunakan sebagai mandala pertahanan terluar dalam menghadapi ancaman terhadap keutuhan NKRI.
- c. Media Perhubungan. Sebagai media perhubungan, laut merupakan urat nadi perdagangan dan perekonomian nasional dan

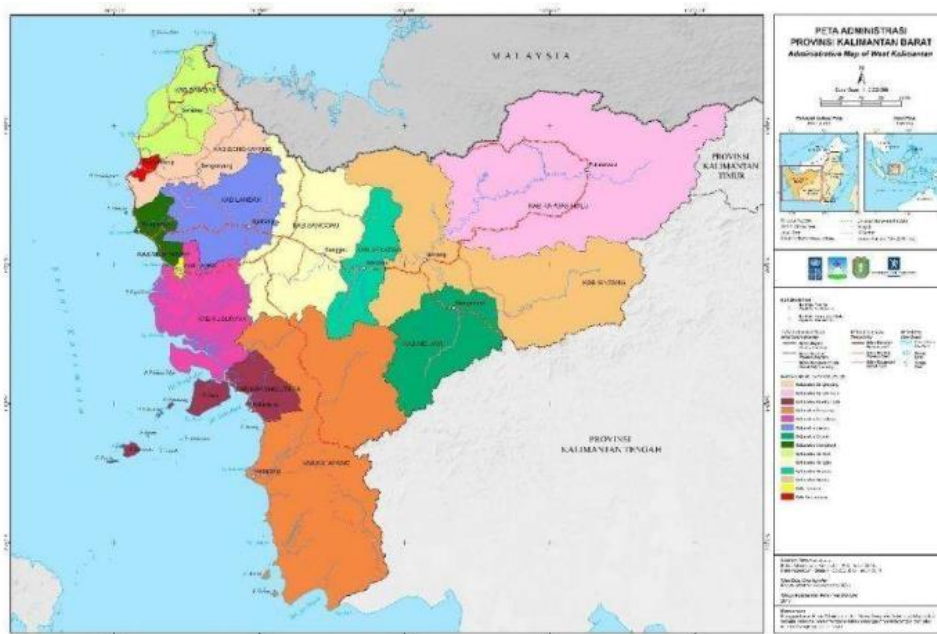
internasional. Keberhasilan pembangunan sarana perhubungan, akan memperlancar pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara

d. Media Penggalian Sumber Daya Alam (SDA). Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut selain dapat meningkatkan kebutuhan pangan, energi dan bahan baku juga digunakan untuk meningkatkan devisa negara.

Pada dasarnya Dawilhanla merupakan setiap upaya yang bertujuan untuk membentuk setiap potensi maritim yang diarahkan sebagai kekuatan pertahanan dan kemananan negara dalam bentuk Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) dan operasi pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya. Hal ini mengandung arti bahwa Dawilhanla meliputi pemberdayaan potensi maritim di seluruh wilayah NKRI baik darat, laut dan udara serta seluruh potensi maritim yang ada didalamnya.

Dalam Undang- Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Setneg RI, 2007), menyatakan bahwa pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait berdasarkan aspek adiministratif dan aspek fungsional. Pengertian tersebut dapat diartikan pula bahwa sebuah wilayah tidak selalu bersifat fisik, akan tetapi lebih menitikberatkan pada interaksi atau hubungan antar manusia dengan semua sumber daya yang tersedia di dalam suatu unit geografis tertentu. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat (BPS Pemprov Kalbar, 2021), secara geografis posisi wilayah provinsi Kalbar terletak pada 2° 08' Lintang Utara - 3° 05' Lintang Selatan dan 108° 30' - 114° 10' Bujur Timur. Secara struktur kewilayahan, provinsi Kalbar dibagi menjadi tiga struktur wilayah, terdiri dari wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara. Wilayah pesisir dan kepulauan terdiri dari Kota dan Kabupaten

yang terletak di wilayah pesisir yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Wilayah pedalaman terdiri dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Ketapang. Sedangkan untuk wilayah perbatasan antar negara adalah wilayah-wilayah di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang terdiri dari Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Khusus di wilayah perbatasan ini, terdapat akses keluar masuk antar negara yang berupa jalan darat yang berlokasi di wilayah Serawak dengan provinsi Kalbar dengan jarak tempuh sekitar 400 km (Pontianak - Entikong - Kuching - Serawak) serta waktu tempuh berkisar enam sampai dengan delapan jam perjalanan.



**Gambar 1.1** **Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Barat**

Sumber : Profil Pembangunan Kalbar 2019

Secara keseluruhan luas wilayah provinsi Kalbar adalah sekitar 147.307 km<sup>2</sup> atau sama dengan 1,13 kali luas Pulau Jawa. Secara urutan

provinsi Kalbar termasuk provinsi terbesar ketiga setelah provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 319.036,05 km<sup>2</sup> dan Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 153.564,50 km<sup>2</sup>, sedangkan urutan keempat adalah provinsi Kalimantan Timur dengan luas kurang lebih mencapai 129.873 km<sup>2</sup>. Adapun batas- batas wilayah provinsi Kalimantan Barat meliputi :

- a. Pada bagian Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pada bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Laut Jawa.
- c. Pada bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
- d. Pada bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Melihat konstelasi geografis Sumber Daya Nasional yang dimiliki provinsi Kalimantan barat, terdapat kemungkinan potensi gangguan keamanan yang bisa timbul di laut ataupun melalui laut. Potensi ini dapat berupa ancaman faktual (*real threat*) misalnya ancaman pelanggaran hukum dalam bentuk penyelundupan, penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), bajak laut (*piracy*), perompakan (*sea robbery*), *Transnational Organized Crime (TOC)*, serta ancaman terhadap sumber daya laut dan lingkungan, ancaman bahaya navigasi hingga ancaman kekerasan berupa terorisme maritim, separatisme, dan tidak menutup kemungkinan ada negara lain yang akan melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi ilegal. Perairan Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia dan Laut Natuna merupakan salah satu alur pelayaran Internasional termasuk dalam Zona III bersama Natuna, Karimata dan Natuna Utara sebagai bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I).

**Tabel 1.1 Angka Kejahatan Yang Dilaporkan Keseluruhan  
(Crime Total) Tahun 2010 - 2021**

POLDA KALBAR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Polres Sambas	576	687	498	497	363	278	248	296	350	347	291	276
Polres Bengkayang	519	482	486	397	298	189	97	124	289	235	114	156
Polres Landak	265	300	324	420	315	166	107	152	194	142	157	168
Polres Pontianak	482	387	366	333	311	249	191	252	268	277	326	246
Polres Sanggau	386	440	385	399	364	308	201	171	350	333	286	267
Polres Ketapang	600	600	640	648	744	471	198	417	627	507	424	462
Polres Sintang	457	449	349	457	425	201	59	165	235	218	200	163
Polres Kapuas Hulu	232	233	191	203	189	113	76	106	148	108	88	63
Polres Sekadau	144	119	121	78	86	86	67	75	90	64	44	87
Polres Melawi	171	161	182	174	180	125	113	134	139	95	70	83
Polres Kayong Utara	-	-	-	-	-	-	-	37	62	73	55	19
Polresta Pontianak *)	3.895	5.035	5.541	4.458	3.740	3.116	2.569	3.038	2.476	2.303	1.149	1.113
Polresta Singkawang	977	1.018	845	843	314	425	209	265	350	239	266	257
Polresta Kubu Raya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

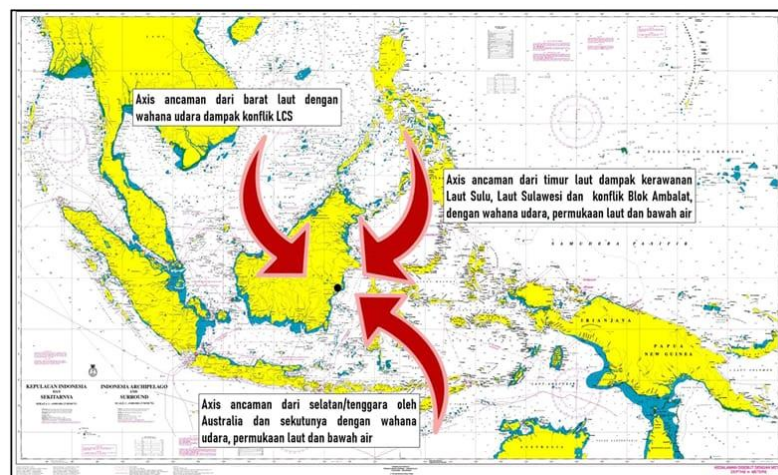
Sumber : Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat

Keterangan : \*) sampai tahun 2020 masih termasuk wilayah Kabupaten Kubu Raya

Letak geografis perairan Kalbar yang berhadapan dengan ALKI I menjadikan wilayah perairan dan pesisirnya sebagai daerah strategis yang memiliki nilai peluang sekaligus ancaman. ALKI I sebagai alur lintas damai bagi pelayaran- pelayaran internasional yang melaksanakan perdagangan akan menjadi peluang dari sektor ekonomi dan akan menjadi ancaman bagi sektor pertahanan dan keamanan negara. Wilayah Kalimantan Barat yang membentang dari utara dekat perbatasan Malaysia sampai dengan Selatan sepanjang kurang lebih 1.398 km, sampai dengan saat ini Pemerintah provinsi/ kota, belum sepenuhnya memberdayakan garis pantai itu sebagai sebuah wilayah/ kawasan yang sangat berpotensi dalam rangka menjaga keamanan nasional, sehingga perlu penanganan langsung dari pemerintah kabupaten/ kota, provinsi termasuk dukungan dari pemerintah pusat.

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden RI telah mengumumkan secara resmi lokasi Ibukota Negara (IKN) Indonesia yang baru. Hal ini merupakan sebuah langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Sebagaimana diumumkan oleh Presiden lokasi IKN yang baru

adalah terletak di provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dampak perpindahan lokasi IKN tersebut, berimplikasi terhadap perubahan *Center of Gravity* (CoG) Indonesia yang juga berpindah dari Jakarta ke IKN yang baru. Sebagai salah satu instrumen pertahanan, maka TNI AL memiliki tugas untuk mengamankan dan mempertahankan IKN dari segala bentuk ancaman yang datang dari laut. Untuk itu maka penggelaran kekuatan dan memberdayakan potensi maritim yang berada disekitar kawasan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pertahanan IKN tersebut (Mabesal Staf Umum Operasi, 2019).



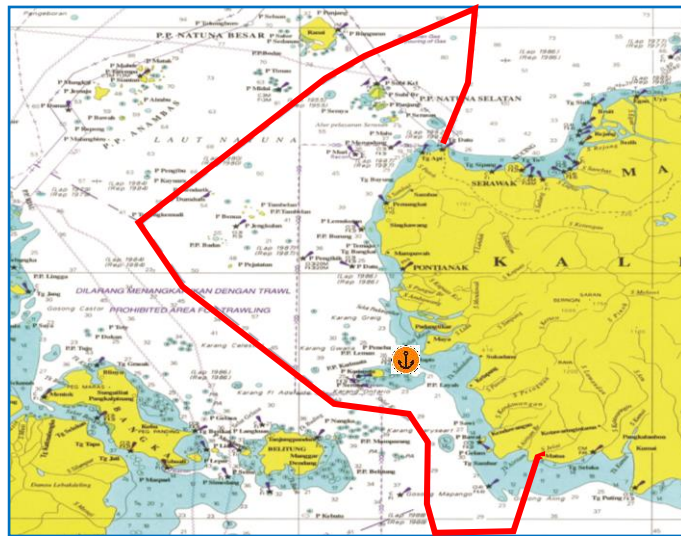
**Gambar 1.2 Posisi Kawasan IKN Dan Prediksi Ancaman**

Sumber : Staf Operasi Mabesal. Konsep Operasi Pertahanan IKN Aspek Laut

Dengan melihat situasi perkembangan lingkungan strategis saat ini maka dibutuhkan Strategi yang tepat dengan memberdayakan segala potensi maritim yang ada di wilayah Kalimantan Barat sebagai sumber daya nasional untuk memproyeksikan kekuatan dari laut ke darat dalam rangka memperkuat Sishanrata. Ruang potensi maritim wilayah Kalimantan Barat mengandung dua arti strategis yang meliputi sarana pembangunan dan sarana pertahanan. Sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis Indonesia, upaya dalam mengoptimalkan terwujudnya tata ruang wilayah maritim di Kalimantan Barat untuk

kepentingan pertahanan sampai dengan saat ini belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum seimbangnya antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan dalam mengelola dan memanfaatkan ruang maritim Kalimantan Barat, kurangnya pengetahuan dan paradigma masyarakat yang berorientasi maritim, belum didukung regulasi yang memadai, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang maritim, belum adanya dukungan kelembagaan yang menangani, minimnya ketersediaan data/ informasi mengenai ruang dan potensi maritim Kalimantan Barat sebagai salah satu sumber daya nasional di wilayah Kalimantan Barat guna memperkuat serta mengoptimalkan sistem pertahanan rakyat semesta, yang pada akhirnya mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan perencanaan pembangunan dan penerapan strategi pertahanan negara aspek laut di wilayah provinsi Kalimantan Barat.

Kehadiran Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XII/ Pontianak sebagai salah satu Satuan Komando Wilayah daerah dan sebagai ujung tombak/ *leading sector* pemberdayaan potensi maritim dalam melaksanakan Dawilhanla secara berdiri sendiri atau bersama instansi pemerintah lainnya untuk menyiapkan potensi maritim di wilayah Kalbar, menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan serta kemanunggalan TNI dengan rakyat. Wujud nyata dalam pemberdayaan potensi maritim adalah dengan pembinaan potensi maritim dengan objek potensi geografi, potensi demografi, kondisi sosial, Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP), sarana dan prasarana dan Logistik Wilayah (Mabes TNI AL, 2018).



**Gambar 1.3 Peta Wilayah Kerja Lantamal XII**

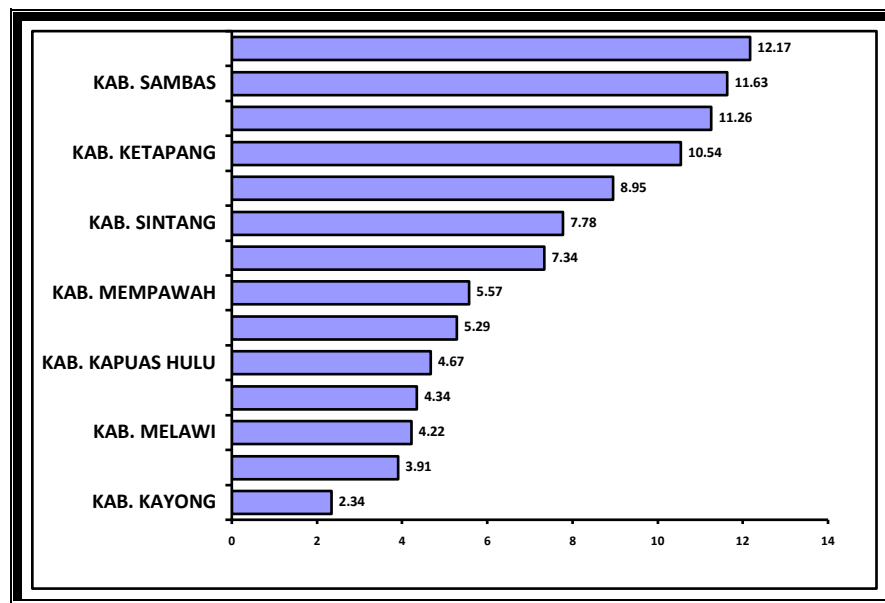
Sumber : Staf Operasi Mako lantamal XII Pontianak

Lantamal XII/ Pontianak beserta jajaran di bawahnya terus menselaraskan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat Kalimantan Barat yaitu dengan mengoptimalkan peran Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) dalam membina masyarakat pesisir dan kepulauan. Kebijakan yang dimaksud adalah tentang GNP–SDA bidang kelautan terkait penyusunan tata ruang wilayah laut meliputi :

- a. Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034.
- b. Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalbar Tahun 2014-2034.

Di samping itu juga terus melaksanakan kolaborasi dengan unsur kedinasan pemerintah daerah melalui Dinas Pembinaan Potensi Maritim (Dispotmar) Lantamal XII/ Pontianak dan jajaran di bawahnya (Lanal dan Posal) yang tersebar di seluruh wilayah Kalbar.

Keberadaan masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan pada dasarnya merupakan ujung tombak atau dapat dikatakan sebagai kekuatan yang sangat potensial sebagai kekuatan pengganda dari TNI ditinjau dari aspek pertahanan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah mereka belum menyadari pentingnya pertahanan dalam melindungi kegiatan perekonomian di sepanjang pesisir pantai dan kepulauan Kalimantan Barat. Hal ini dapat dimaklumi karena pola pikir (*mindset*) masyarakat pesisir dan kepulauan disekitarnya belum memahami potensi maritim yang sedang gencarnya dicanangkan oleh Pemerintah. Sebagai gambaran umum data jumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat pesisir bisa dilihat dari tabel di bawah ini :



**Gambar 1.4 Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020**

Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020

Gambar di atas merupakan data jumlah penduduk di daerah-daerah sepanjang pesisir wilayah Kalimantan Barat. Secara jumlah menurut peneliti memang masih sedikit akan tetapi ini merupakan kekuatan potensial dalam upaya untuk membangun sebuah pertahanan

maritim yang kuat dan tangguh. Sebesar besarnya SDA yang ada, tapi tidak didukung pengelolaan dan pemanfaatan oleh SDM/ masyarakat pesisir di sekitarnya, maka tidak mungkin potensi maritim akan terwujud.

**Tabel 1.2 Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap dan Nelayan Perikanan Budidaya di Kabupaten/ kota di Kalbar Tahun 2020**

KOTA/KABUPATEN	PERIKANAN TANGKAP		PERIKANAN BUDIDAYA
	LAUT	OPERAIRAN UMUM	
KAB. SAMBASO	2656	835	1214
KAB. BENGKAYANG	1440	710	2090
KAB. MEMPAWAH	1898	634	656
KAB. KETAPANG	1436	1260	1598
KAB. KAYONG UTARA	900	352	400
KOTA PONTIANAK	18	70	164
KOTA SINGKAWANG	1570	130	272

Sumber : BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020

Secara umum, pemahaman atau *mindset* masyarakat Kalbar khususnya tentang potensi maritim terkait pemanfaatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat maupun pertahanan negara masih rendah, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang bervisi maritim dan mendukung Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Maritim. Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang mendalami dan tertarik pada bidang kemaritiman berakibat terhadap peran pertahanan yang belum mampu mengendalikan wilayah laut nasional Indonesia. Rendahnya dukungan SDM dan tingkat kepedulian pemimpin terhadap masalah kemaritiman ini tercermin dari ketidakpedulian pemimpin terhadap permasalahan kemaritiman ini terlihat dari ketidakpedulian para pemangku kepentingan (stake holder) terhadap bidang maritim.

Pengelolaan dan pemanfaatan potensi maritim sangat dibutuhkan agar wilayah tersebut dapat dikembangkan menjadi ruang pertahanan maritim yang kuat. Akan tetapi sulitnya data dan informasi yang akurat tentang kemaritiman mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan pengelolaan wilayah pertahanan maritim. Sebagai parameter tara ruang

wilayah pertahanan maritim, dibutuhkan data yang sangat mendasar dihadapkan dengan permasalahan teknis terkait ketersediaan data/informasi dan kelengkapan lainnya, meliputi cakupan data dan peta dasar yang baku, standarisasi klasifikasi dan pengkodean data geografis, sistem geofisiensi, penentuan komponen basis data bersama dan penentuan prosedur akses data dan pertukaran data.

Dalam penelitian yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini, ada 3 (tiga) permasalahan utama yang dihadapi Lantamal XII/ Pontianak sebagai leading sektor dalam memberdayakan potensi maritim untuk memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta yaitu:

- a. Aspek Sumber Daya Manusia di wilayah sepanjang pesisir dan perbatasan Kalimantan Barat yang belum sepenuhnya mengetahui pentingnya potensi maritim guna memperkuat Sishanrata.
- b. Aspek Perekonomian, kesejahteraan masyarakat pesisir Kalimantan barat yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan masih belum optimal.
- c. Aspek Pertahanan dan keamanan, belum maksimalnya infrastruktur serta sarana prasarana yang mendukung pertahanan wilayah maritim dalam rangka melindungi kepentingan pembangunan kelautan nasional.

Dari penjelasan, uraian serta data pada latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk menyusun sebuah Tesis dengan judul "Pemberdayaan Potensi Maritim Di Wilayah Guna Memperkuat Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Studi Di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII/ Pontianak)", yang paling utama adalah karena di wilayah ini terdapat potensi maritim yang besar yaitu masyarakat pesisir dan kepulauan di sekitarnya sebagai benteng potensial pertahanan maritim

dalam mendukung Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, mengingat bahwa:

- a. Posisi Kalimantan Barat terletak berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, termasuk di dalamnya adanya isu Laut Natuna Utara.
- b. Kalimantan barat merupakan buffer zone sebelah barat IKN;
- c. Di Kalimantan Barat terdapat Pangkalan Utama TNI AL, sekaligus sebagai pangkalan aju unsur tempur AL dalam melaksanakan PAM ALKI.

Melihat kondisi geografis sedemikian rupa, Provinsi Kalimantan barat sangat rentan terhadap tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, mengingat akses keluar masuk sangat mudah untuk dilalui, terutama dari daerah perbatasan dan perairan. Sementara itu di sisi lain program pemberdayaan wilayah pertahanan yang bekerja sama dengan instansi lain melalui pembinaan potensi maritim setiap tahun sering dilaksanakan. Hal ini diperlukan upaya- upaya strategis dalam mengembangkan potensi Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan letak strategis dan dengan sumber daya manusia yang memadai. Peran serta Lantamal XII/ Pontianak dalam pelaksanaan pembinaan potensi maritim khususnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) maritim untuk menjadi komponen cadangan guna memperkuat Sishanrata di wilayah pesisir Kalimantan Barat sangat dibutuhkan mengingat selama ini ada beberapa keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut :

- a. Kurangnya kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), kurangnya kegiatan Pembinaan Desa Pesisir dan kurangnya kegiatan pelatihan bela negara terhadap masyarakat pesisir yang berada di wilayah kerja Lantamal XII/ Pontianak.

b. Adanya keterbatasan jumlah personel potensi maritim Lantamal XII/ Pontianak dalam pembinaan masyarakat maritim dihadapkan dengan luasnya wilayah maritim yang berada diwilayah kerja Lantamal XII/ Pontianak.

c. Sarana prasarana yang dimiliki Lantamal XII/ Pontianak untuk penyiapan masyarakat pesisir Kalimantan Barat sebagai suatu kekuatan pertahanan semesta dalam bentuk komponen cadangan masih belum memadai.

## **1.2. Fokus dan Subfokus**

Penulisan Tesis ini berfokus pada pemberdayaan potensi maritim oleh Pangkalan Utama TNI AL XII/ Pontianak di wilayah Kalimantan Barat dalam rangka memperkuat pertahanan semesta pemberdayaan wilayah pertahanan baik yang dilakukan oleh satuan TNI di wilayah maupun oleh instansi lainnya. Sedangkan subfokus penelitian ini ada tiga, yaitu:

a. Program kegiatan dalam pemberdayaan potensi maritim oleh Lantamal XII/ Pontianak selama lima tahun anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Subfokus ini akan melihat sejauh mana efektifitas program kegiatan Lantamal XII/ Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam menciptakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh potensi sumber daya nasional di wilayah Kalimantan Barat.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberdayaan potensi maritim. Faktor ini ada dua yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang terdiri dari komponen-komponen yang ada pada Lantamal XII/ Pontinak sebagai elemen kekuatan maupun kelemahan masing-masing dengan kriterianya. Sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari komponen-komponen yang ada di

wilayah Lantamal XII baik unsur TNI yang lainnya maupun instansi terkait lainnya, masing-masing dengan kreterianya.

c. Upaya terobosan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemberdayaan potensi maritim. Selain memiliki program kerja, Lantamal XII/ Pontianak tentu melakukan kegiatan lain baik bersama instansi terkait, maupun secara mandiri untuk mempercepat tercapainya pemberdayaan wilayah pertahanan untuk mendukung sistem pertahanan rakyat yang bersifat semesta.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah yang dapat peneliti rumuskan dalam penyusunan Tesis ini adalah bagaimana strategi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII/ Pontianak dalam pemberdayaan potensi maritim guna memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana program kegiatan pemberdayaan potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat?
- b. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pemberdayaan potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat?
- c. Bagaimana upaya penyelenggaraan potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dari penyusunan tesis ini adalah :

- a. Menganalisa program kegiatan yang dilaksanakan Lantamal XII/ Pontianak dalam pemberdayaan potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat guna memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta.

b. Menganalisa Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat guna memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta.

c. Menganalisa upaya penyelenggaraan pemberdayaan potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat guna memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan serta cara berfikir tentang bagaimana memberdayakan potensi maritim dalam memperkuat sishanrata.

b. Secara Praktis adalah untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan, lembaga pendidikan serta instansi terkait agar:

- 1) Diperoleh strategi maupun formulasi yang cocok dalam menerapkan pemberdayaan maritim di wilayah Kalimantan Barat guna memperkuat sistim pertahanan rakyat semesta.

- 2) Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat guna memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta.

- 3) Mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemberdayaan potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat guna memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta.

